

USULAN PENELITIAN



**EVALUASI KEBERHASILAN PENANGANAN COVID-19 PEMERINTAH KOTA
SURAKARTA**

Tim pengusul:
Estiningtyastuti, SE., MM., M.Hum. / 0611096701

**STIE SWASTA MANDIRI SURAKARTA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul penelitian : Evaluasi Keberhasilan Penanganan Covid-19
Pemerintah Kota Surakarta

Nama lengkap : Estiningtyastuti, SE., MM., M.Hum
a. NIDN : 0611096701
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
c. Program studi : Akuntansi
d. Nomor HP : 081390102653
e. Alamat Surel : estiningtyastuti@stas.ac.id

Anggota peneliti
Nama lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
Biaya Penelitian : Rp 2.500.000,-
Penelitian Tahun ke- : 1 (pertama)

- Diusulkan ke DRPM : Rp –
- Dana internal PT : Rp 2.500.000,-
- Dana instansi lain : Rp - / *in kind* tuliskan: -

Mengetahui
Ketua



Amru Sukmajati., SE. MM

Surakarta, 19 November 2020
Ketua Peneliti



Estiningtyastuti, SE., MM., M.Hum

Ketua LPPM



Simon Nisja Putra Zai, SE., M.Acc
NIDN. 0620129003

A. Pendahuluan

World Healty Organization (WHO) merupakan organisasi kesehatan dunia, telah mengumumkan bahwa Covid-19 merupakan penyakit menular. Negara Indonesia merupakan salah satu negara terdampak penyebaran virus tersebut yang menyebabkan beberapa pemerintah daerah di Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terdapat beberapa pemerintah kota yang menetapkan kejadian luar biasa melalui surat edaran pemerintah daerah, salah satunya yaitu pemerintah kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan kejadian luar biasa (KLB) melalui Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor 441.1/668 Tahun 2020 mengenai kebijakan Pemerintah Kota Surakarta menghadapi Covid-19. Pada bulan maret 2020 pemerintah Kota Surakarta telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam menanggulangi covid-19, diantaranya yaitu Keputusan Walikota Surakarta Nomor 950/29 Tahun 2020 mengenai penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat KLB, Keputusan Walikota Nomor 645.3/40 Tahun 2020 tentang rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi, dan Keputusan Walikota nomor 443.05/30 Tahun 2020 tentang gugus depan percepatan penanganan Covid-19 Kota Surakarta. Kebijakan pemerintah Kota Surakarta tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang pencegahan covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dan Maklumat Kapolri No. Mak/2III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk tanggapan pemerintah kota dalam rangka menanggulangi Covid-19. Kebijakan pemerintah kota Surakarta telah mengubah berbagai macam aktivitas di lingkungan pemerintah kota. Salah satu aktivitas yang mengalami perubahan yaitu aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kota Surakarta. Perubahan yang terjadi yaitu adanya aktivitas-aktivitas yang semula dilakukan offline kemudian dilakukan secara daring, kepatuhan protocol kesehatan, membatasi aktivitas kerumunan, dan adanya rapat yang dilakukan terbatas dan secara *daring*. Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis kesehatan yang pada akhirnya membawa negara-negara yang terdampak mengalami resesi ekonomi (Shibata, 2020). Adanya pandemi covid-19 membawa perekonomian nasional maupun daerah mengalami perlambatan. Berdasarkan badan pusat statistic (BPS) perekonomian Indonesia kuartal I tahun 2020 bertumbuh hanya sebesar 2,97% kemudian pada kuartal II tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,32%. Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan dalam rangka

menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Salah satu implementasi kebijakan tersebut yaitu pengelolaan keuangan daerah dengan adanya pemusatan dan pengalokasian kembali (APBD) Anggaran pendapatan belanja daerah (Rabbani, 2020).

UU No. 2 Tahun 2020 mengamanahkan pemerintah daerah memiliki hak sepenuhnya untuk mengatur tata kelola keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah. Walikota Surakarta melalui media online suara merdeka pada tanggal 2 Mei 2020 menyampaikan bahwa realokasi APBD 2020 untuk Covid-19 sebesar 277 milyar. Pada tanggal 14 oktober 2020 dimuat pada situs dprd.surakarta.go.id pemerintah Kota Surakarta mengesahkan postur anggaran APBD, sebesar 328 miliar dialokasikan untuk pelayanan dasar masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19. Adanya realokasi dan pemusatan pengelolaan keuangan mengharapkan adanya optimalisasi OPD agar dapat memenuhi belanja operasional dalam penanganan covid-19. Selain itu adanya pandemic covid-19 diharapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai bentuk dukungan dan kehadiran pemerintah dalam pemulihan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Rabbani, 2020).

Penelitian (Amos et al., 2021) menjelaskan bahwa adanya optimalisasi proses bisnis internal, pembelajaran, dan kualitas pelayanan dapat memberikan peningkatan kinerja organisasi dan keuangan yang baik. Tata kelola Pemerintahan pada masa pandemi covid-19 mengharapkan peningkatan kompetensi kegawai yang berkerja secara kolaboratif dan tingkat fleksibilitas yang tinggi serta manajemen disaster dan konflik yang baik (Velasques & Lara, 2021). Faktor keberhasilan pemerintah dalam menghadapi keterbatasan, akibat pandemic covid-19 ditunjukkan adanya kualitas pelayan konsisten dan kebijakan responsif demi terciptanya lingkungan yang kondusif. Selain itu, keberhasilan dalam menangani covid-19 ditunjukkan adanya kepastian pemerintah dalam mengendalikan ekosistem *epidemic* baik melalui kebijakan, peningkatan pelayanan publik, maupun alokasi anggaran (Kang et al., 2021). Penelitian (Mihail & Kloutsiniotis, 2016) menunjukkan bahwa penerapan *High Performance Work System* pada internal organisasi merupakan upaya strategi untuk meningkatkan kinerja dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga melalui optimalisasi kompetensi dan praktik sumber daya manusia, ketrampilan, komitmen serta fleksibilitas. Pendekatan manajerial merupakan strategi yang prospektif dalam membawa organisasi melakukan pembenahan menuju tataran *new normal*

organisasi, melalui optimalisasi pada kualitas pelayanan, bisnis proses internal dan adanya implementasi kebijakan (Ivanov & Dolgui, 2021).

Pada masa pandemic covid-19, perubahan aktivitas terjadi pada semua elemen organisasi tidak terkecuali pada pemerintah Kota Surakarta. Hingga saat ini pemerintah kota Surakarta dalam tahap melakukan pembenahan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pelayanan publik dan alokasi APBD yang menitikberatkan pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk memberikan kinerja yang baik melalui laporan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mengharuskan pemerintah daerah memberikan informasi laporan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberhasilan pemerintah Kota Surakarta dalam penanganan Covid-19 melalui indikator kualitas pelayanan, proses bisnis internal, dan kebijakan pemerintah daerah (Amos et al., 2021); Ivanov & Dolgui, 2021; Mihail & Kloutsiniotis, 2016). Penelitian ini memasukkan indikator akuntabilitas dan manajemen lingkungan (Kang et al., 2021;(Susanti & Noor, 2020) Velasques & Lara, 2021) dalam mengukur kinerja pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah membangun model evaluasi keberhasilan manajemen tata kelola pemerintah daerah dalam menangani pandemi covid-19.

B. Landasan teori

1. Good Governance

Good Governence adalah prinsip tata kelola yang mengacu pada adanya kerjasama pemerintahan dan warga negara. Keberhasilan pemerintahan dalam suatu negara ditunjukkan dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam memberikan kontribusi baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Keping, 2018). Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang merupakan mekanisme praktis yang diatur melalui adanya pembuat kebijakan, administrasi, fungsi pengawasan serta adanya pertanggungjawaban kepada publik (Nag, 2018). Terdapat 6 dasar adanya Good Governance (Keping, 2018).

- Legitimasi

Menjelaskan bahwa adanya ketertiban sosial dan kebijakan yang telah disahkan harus dijalankan dengan dasar sukarela. Peraturan yang dijalankan merupakan peraturan yang telah

di sah kan oleh suatu kelompok yang membahas mengenai kebijakan untuk kepentingan orang banyak Semakin tinggi legitimasi maka tata kelola pemerintahan semakin baik.

- **Transparansi**

Menjelaskan adanya kepatuhan dan kebijakan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan dan harus dilaporkan kepada masyarakat, seperti halnya peraturan, pengambilan keputusan, anggaran administrasi dan adanya alokasi anggaran kepada masyarakat.

- **Akuntabilitas**

Menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh suatu pemerintah terkait dengan tugas-tugas dan tanggungjawab jabatan dan kewajiban tertentu kepada masyarakat. Hal tersebut menjelaskan semakin tinggi akuntabilitas publik maka baik tata kelola pemerintahan dijalankan.

- **Dasar hukum/kebijakan**

Merupakan kepatuhan terhadap undang-undang tertinggi dalam suatu pemerintahan yang dijalankan dan di implementasikan pada struktur pemerintahan hirarki yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

- **Responsibilitas**

Responsibilitas merupakan tindak lanjut adanya akuntabilitas publik. Responsibilitas merupakan bentuk tanggapan pemerintah yang proaktif kepada masyarakat dan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pemerintahan.

- **Efektivitas**

Efektivitas mengacu pada kinerja manajerial pemerintahan. Efektivitas merupakan aktivitas pemerintahan yang buat dengan adanya prosedur yang efektif dan biaya yang minimal namun memberikan kinerja yang optimal. Efektivitas merupakan luaran atas adanya tata kelola pemerintahan yang baik. semakin tinggi efektivitas pengelolaan pemerintahan maka dapat dikatakan pemerintahan memiliki tata kelola yang baik (Keping, 2018).

2. Key Performance Indicator Pemerintahan

Menurut (Wang et al., 2017) menyebutkan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan dilihat dari adanya perubahan aktivitas yang menjadi lebih baik, adanya pengambilan keputusan yang tegas, terdapat tingkat kepatuhan tinggi terhadap kebijakan, dan kinerja yang ditunjukkan pada adanya output dan dampak kepada masyarakat. Napitupulu (2017) menemukan 15 *critical success*

factors yaitu tersedianya infrastruktur, aktivitas kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan, pengelolaan aplikasi, manajemen perubahan, budaya organisasi, investasi TI, kolaborasi, perencanaan, komunikasi, sosialisasi, *business process reengineering*, manajemen proyek dan keterlibatan *stakeholder*.

3. High performance work system

High performance work system (HPWS) merupakan suatu proses terintegrasi yang menunjukkan adanya perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab (Baik et al., 2019). HPWS dapat dinilai berdasarkan adanya pelatihan, alokasi sumber daya, keterlibatan pemimpin, dukungan manajerial dan insentive yang diperoleh pegawai.

4. Akuntabilitas

Penelitian ini kinerja keuangan ditunjukkan dengan akuntabilitas pemerintahan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) menetapkan 5 indikator akuntabilitas kinerja yaitu; Spesifik (*specific*), data terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dapat dipantau dan dikumpulkan (*trancable*). Dalam peraturan tersebut informasi keluaran (SAKIP) yaitu Pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi target kinerja keseluruhan, penjelasan atas pencapaian, perbandingan capaian kinerja dan program.

5. Environmental Management (manajemen lingkungan)

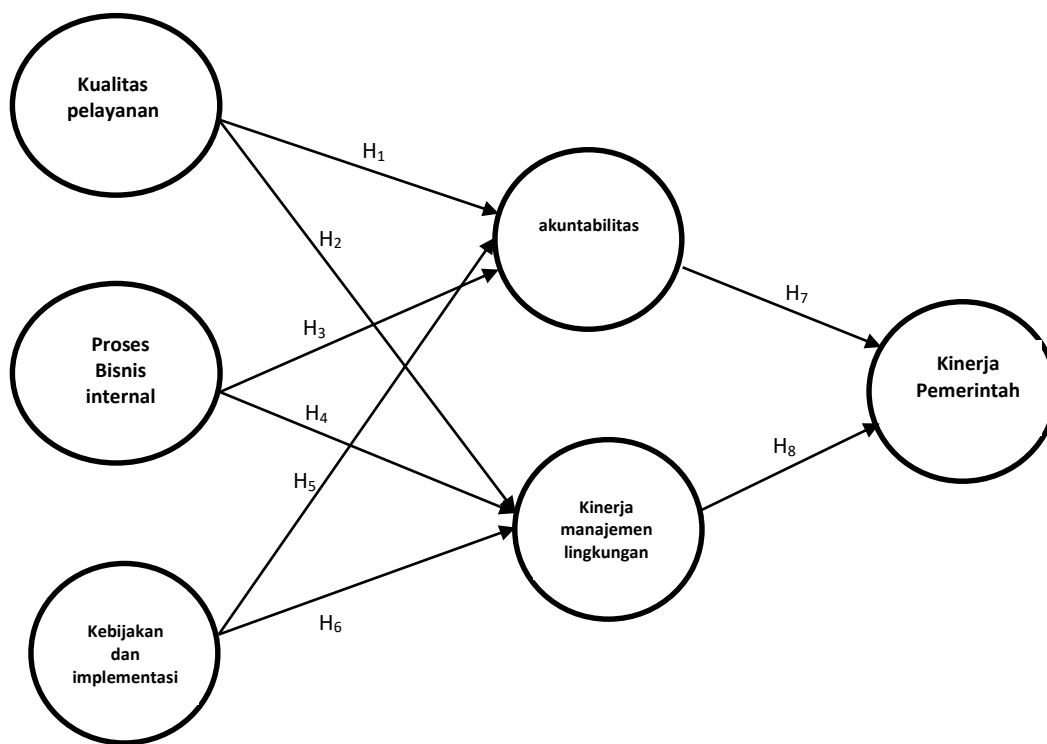
Menurut International Standard Organisation (ISO) 14001, sistem manajemen lingkungan merupakan proses identifikasi, pengelolaan, pemantauan dan pengendalian isu mengenai lingkungan (Todaro et al., 2020). Penerapan manajemen lingkungan dalam pemerintahan merupakan komitmen utama agar tidak terjadi pencemaran virus Covid-19 (Kang et al., 2021). Indikator manajemen lingkungan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran covid-19 yaitu dengan cara adanya pengawasan terhadap lingkungan, anjuran protocol kesehatan, kesiagaan tenaga medis, pencegahan adanya polusi, dan proses evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan (Kang et al., 2021).

6. Pelayanan publik

Pelayanan public adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat luas oleh organisasi publik atau pemerintahan dan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang diberi kepuasan, kesejahteraan dan perlindungan atas keberadaan organisasi tersebut (Osborne et al., 2013). Pada era *new normal* setelah adanya pandemic covid-19, standar pelayanan merupakan tolak ukur kinerja pemerintah

daerah, upaya meningkatkan efektivitas, dan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Rohman & Larasati, 2020). Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public, menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan public meliputi pelaksanaan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan dan memberikan layanan informasi. Terdapat beberapa hal yang perlu dijalankan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu optimalisasi sumber daya secara efektif dan efisien (Nofianti & Suseno, 2014; Susanti & Noor, 2020).

7. Kerangka teoritis



8. Hipotesis penelitian

- H1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic Covid-19.
- H2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen lingkungan di pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19.

- H3. Proses bisnis internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19.
- H4. Proses bisnis internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen lingkungan di pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19.
- H5. Kebijakan dan implementasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19.
- H6. Kebijakan dan implementasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen lingkungan di pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19
- H7. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19
- H8. Kinerja manajemen lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kota Surakarta pada masa pandemic covid-19

C. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (Apuke, 2017) yaitu pendekatan statistik dengan melakukan pengujian empiris berdasarkan data yang diperoleh. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang telah disebar di 3 organisasi pemerintah daerah (OPD) pemerintah Kota Surakarta yaitu Badan perencanaan, pembangunan dan penelitian daerah (BAPPEDA), Sekretariat biro Administrasi Pembangunan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 150 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode Structure equation modeling (SEM) untuk menguji kesesuaian model, validitas dan reliabilitas, serta *path analysis* dengan pendekatan (PLS) *Partial Least Square* (Sun et al., 2018).

D. Road map dan tahapan Penelitian

Persetujuan LPPM	21 November 2020	disetujui
Observasi awal pra-penelitian	04 Desember 2020	dilaksanakan
Persetujuan Pemerintah Kota Surakarta dan dinas terkait	22 Desember 2020	Disetujui
Distribusi kuesioner	5 januari – 5 februari 2021	Terdistribusi

Tahapan pengumpulan dan pengolahan data kuesioner	6 Februari – 13 Februari 2021	Terlaksana
Tahapan review dan analisis mendalam	14 Februari – 03 Maret 2021	Dalam rencana
Tahapan review teman sejawat	4 Maret – 20 Maret 2021	Dalam rencana
Tahapan <i>proofreading</i>	21 Maret – 2 April 2021	Dalam rencana
Tahapan publikasi Jurnal	Mei – Juli 2021	Dalam rencana

DARTAR PUSTAKA

- Amos, D., Au-Yong, C. P., & Musa, Z. N. (2021). The mediating effects of finance on the performance of hospital facilities management services. *Journal of Building Engineering*, 34(October), 101899. <https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101899>
- Apuke, O. D. (2017). Quantitative Research Methods : A Synopsis Approach. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 6(11), 40–47. <https://doi.org/10.12816/0040336>
- Arias Velásquez, R. M., & Mejía Lara, J. V. (2021). Knowledge management in two universities before and during the COVID-19 effect in Peru. *Technology in Society*, 64(January 2020). <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101479>
- Baik, K., Kim, K. Y., & Patel, P. C. (2019). The internal ecosystem of high performance work system and employee service-providing capability: A contingency approach for servitizing firms. *Journal of Business Research*, 104(February), 402–410. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.028>
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Telaah proses rocofusing dan realokasi Apbd. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, 4, 59–78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>
- Ivanov, D., & Dolgui, A. (2021). OR-methods for coping with the ripple effect in supply chains during COVID-19 pandemic: Managerial insights and research implications. *International Journal of Production Economics*, 232, 107921. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107921>
- Kang, A., Ren, L., Hua, C., Song, H., Dong, M., Fang, Z., & Zhu, M. (2021). Environmental management strategy in response to COVID-19 in China: Based on text mining of government open information. *Science of the Total Environment*, 769(December 2019), 145158. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145158>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Mihail, D. M., & Kloutsiniotis, P. V. (2016). The effects of high-performance work systems on hospital employees' work-related well-being: Evidence from Greece. *European Management*

- Journal*, 34(4), 424–438. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.01.005>
- Nag, N. S. (2018). Government, Governance and Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 64(1), 122–130. <https://doi.org/10.1177/0019556117735448>
- Napitupulu, D. (2017). Validity testing of technology acceptance model based on factor analysis approach. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 5(3), 697–704. <https://doi.org/10.11591/ijeecs.v5.i3.pp697-704>
- Nofianti, L., & Suseno, N. S. (2014). Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and their Implications towards Performance Accountability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 98–105. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward a (Public) Service-Dominant Approach. *American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Rohman, A., & Larasati, D. C. (2020). Standar Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal. *Reformasi*, 10(2), 151–163. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1952>
- Shibata, I. (2020). The distributional impact of recessions: The global financial crisis and the COVID-19 pandemic recession. *Journal of Economics and Business*, October, 105971. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2020.105971>
- Sun, L., Ji, S., & Ye, J. (2018). Partial Least Squares. In *Multi-Label Dimensionality Reduction*. <https://doi.org/10.1201/b16017-6>
- Susanti, H., & Noor, M. (2020). [Http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis](http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis). 4(1). <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/PubBis>
- Todaro, N. M., Daddi, T., Testa, F., & Iraldo, F. (2020). Organization and management theories in environmental management systems research: A systematic literature review. *Business Strategy and Development*, 3(1), 39–54. <https://doi.org/10.1002/bsd2.77>
- Wang, C., Medaglia, R., & Zheng, L. (2017). Towards a typology of adaptive governance in the digital government context: The role of decision-making and accountability. *Government Information Quarterly*, August, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.003>